

PROSIDING LOKA KARYA CIDAUN

Cidaun, 14 Desember 2004

PENDAHULUAN

Kondisi CA G. Simpang dan sekitarnya

Hutan Cagar Alam Gunung Simpang (CAGS) dengan luas 15.000 ha adalah kawasan cagar alam terluas di Jawa Barat. Letak geografisnya antara 107°20'18" - 107°28'19" BT, 7°13'28" - 107°24'03" LS berupa pegunungan dan perbukitan membentang pada ketinggian 400 - 1803 m dpl. Terletak di wilayah Kabupaten Cianjur dan bersentuhan langsung dengan beberapa desa di Kecamatan Cidaun sebelah Timur dan Selatan, juga beberapa desa di Kecamatan Naringgul sebelah Barat. CAGS mengalirkan Sungai Cidamar yang merupakan muara sungai-sungai besar lainnya seperti S. Cipaleuh, S. Cimaragang. Sungai Cidamar bermuara di pantai Selatan yaitu daerah Cidaun.

CAGS mempunyai kandungan nilai genetik penting setelah Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Gede Pangrango dan Gunung Halimun (Whitten *et al.* 1996). Vegetasi yang menyusun kawasan ini adalah formasi Fago-Lauracus (Steenis, 1971 dalam Soedjito, H., 1999), tipe hutan yang terbatas hanya di Jawa Barat (Raharjaningtrah *et al.*, 2000). Kawasan hutan ini dihuni sejumlah satwa enigmatic seperti Elang Jawa *Spizaetus bartelsi*, Macan tutul *Panthera pardus*, Owa Jawa *Hylobates moloch*, Surili *Presbytis comata*, Kijang *Muntiacus muntjac*, dan Trenggiling *Manis javanica*. Nurwatha *et al* (in prep.) mencatat paling sedikit ada 122 jenis burung, 16 diantaranya endemik untuk Jawa dan Bali.

Agresifitas masyarakat sekitar CAGS cukup tinggi dalam melakukan tekanan terhadap hutan sebelum muncul program pengelolaan hutan oleh masyarakat. Illegal logging terjadi dimana-mana, rambahan hutan untuk lahan pertanian semakin meluas, banjir dan longsor kerap kali terjadi. Kondisi ini diperparah dengan terlibatnya beberapa oknum petugas dan orang luar dalam proses kerusakan tersebut, akibatnya masalah semakin kompleks dan rumit.

Keberadaan CAGS sebagai daerah hulu sangat berpengaruh terhadap daerah hilir di sekitarnya. Kawasan pesisir Cidaun merupakan salah satu daerah hilir yang akan terkena dampak langsung akibat baik atau buruknya kondisi hutan, misalnya ketersediaan air, kondisi pantai, keragaman hayati laut, sosial ekonomi masyarakat dll.

Sejak tahun 2000 YPAL melakukan pendampingan masyarakat di lima desa tepi hutan yaitu Desa Mekarjaya, Desa Puncakbaru, Desa Cibuluh, Desa Neglasari dan Desa Gelarpawitan, semuanya berada di Kecamatan Cidaun. Dari proses pendampingan ini masyarakat mulai sadar akan perlunya pembenahan. Mereka tidak saja membenahi fisik hutan dan pola pandangannya terhadap hutan, juga membenahi kelembagaan masyarakat (desa) karena desa merupakan lembaga pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kesadaran masyarakat berubah menjadi gerakan sosial yang mengarah pada kelestarian hutan.

Gerakan Masyarakat

Desa menjadi salah satu media strategis untuk mengawali sebuah upaya memperbaiki kerusakan hutan, karena saat era otonomi daerah, desa menempati posisi paling diuntungkan. Hanya saja kondisi kelembagaan desa saat ini mengalami kehancuran yang dimulai jauh sejak jaman kolonialisme, dimana penjajah melakukan perubahan kelembagaan desa yang tadinya mandiri dan mampu menyelesaikan masalah desanya sendiri, menjadi perpanjangan alat kekuasaan sekaligus pekerja mereka.

Menguntungkan sekali pola pikir pemerintah mengalami perubahan dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 yang memberikan kesempatan otonomi kepada desa. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa harus membuat peraturan desa bekerja sama dengan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak ketiga yang merencanakan pembangunan wilayah wajib mengikut sertakan Pemerintah Desa dan BPD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Masyarakat di lima desa sekitar CAGS tengah meniti upaya memperbaiki kelembagaan desanya, terutama dalam pengelolaan sumber daya desa termasuk hutan. Mereka telah membuat peraturan desa mengenai pelestarian hutan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Di setiap desa telah terbentuk **Raksabumi** yaitu satuan tuga masyarakat desa untuk menjadi pelopor dalam menjalankan peraturan desa. Masyarakat telah

berhasil menghentikan 61 chainsaw yang selama ini menjadi alat perusak hutan dan mengajak puluhan perambah untuk menghentikan kegiatannya di dalam hutan. Saat ini hutan di sekitar desa mereka dapat dikatakan aman yang mungkin akan memakan waktu lama jika dikerjakan sendiri oleh instansi pemerintah yang mengurus hutan cagar alam.

Lahirnya Raksabumi di lima desa di Kecamatan Cidaun merupakan sebuah model gerakan masyarakat yang dapat dijadikan pembelajaran dan direplikasi untuk desa-desa lain. Selain itu dukungan berbagai pihak mutlak diperlukan untuk menguatkan model inisiatif masyarakat tersebut.

LOKA KARYA CIDAUN

Gagasan Awal

Program-program pelestarian alam yang telah dibangun selama beberapa tahun di lima desa tersebut tak akan kuat dan bertahan lama bila tidak mendapat dukungan politis dari instansi pemerintah dan masyarakat sekitarnya (hulu – hilir). Upaya pelestarian akan merupakan gerakan-gerakan parsial yang tak akan tuntas dalam pencapaian misi melestarikan hutan. Oleh karena itu upaya pelestarian daerah hulu (hutan) sampai dengan daerah hilir (kawasan pesisir Cidaun) sebagai satu kesatuan harus dibangun. Jaringan erat antara masyarakat hulu dan hilir harus diciptakan.

Langkah awal untuk mewujudkan gagasan ini, Raksabumi di lima desa dengan didukung oleh pihak Kecamatan Cidaun, YPAL (Yayasan Pribumi Alam Lestari) dan PPKM (Perkumpulan Pemulihan Keberdayaan Masyarakat) mengadakan acara loka karya di Cidaun tanggal 14 Desember 2004. Tema loka karya ini adalah “Upaya Pelestarian Daerah Tangkapan Air Cidaun”.

Media Pertukaran Informasi

Loka karya di Cidaun ini telah menjadi media pertukaran informasi dan pengalaman antara masyarakat daerah hulu dan masyarakat daerah hilir. Telah terselenggara dialog masyarakat dengan aparat Pemda dan Instansi Keamanan tentang permasalahan yang ada. Setelah melihat permasalahan-permasalahan yang muncul dan pembahasan-pembahasan yang disampaikan dalam forum, masyarakat dan aparat pemerintahan terdorong melakukan upaya membangun gerakan sosial yang lebih luas dari daerah hulu sampai hilir dan permasalahan yang paling krusial dihadapi saat ini adalah rusaknya DAS Cidamar.

DAS Cidamar Perlu Diselamatkan

Indonesia adalah negara kepulauan. Konsep pembenahan lingkungan tidak dapat disamakan dengan negara konntinen (benua). Untuk *ngariksa* sebuah pulau harus dilihat dari atasnya yaitu gunung, apakah sudah baik atau belum. Bagi negara kepulauan, gunung merupakan pilar. Kerusak lingkungan di gunung akan berdampak pada daerah sekitarnya.

Hutan merupakan indikator baik atau rusaknya kondisi lingkungan. Sebagai indikator lingkungan hutan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Hutan dapat mengubah CO₂ menjadi O₂
- Hutan (pohon) dapat menyerap air delapan kali gedung/bangunan.
- Hutan juga dapat merupakan penahan air.
- Hutan merupakan bendungan alam, artinya air yang dibendung hutan akan meresap ke dalam tanah.

Bagi manusia atau makhluk lainnya, hutan banyak memberi manfaat. Pada umumnya orang memandang manfaat besar hutan adalah kayunya. Padahal dari sekian banyak manfaat hutan yang dapat diambil, kayu hanyalah 5%-nya saja. Masih banyak manfaat hutan yang belum diketahui dan digali.

Kebutuhan akan adanya hutan bukan hanya di gunung saja tapi juga harus tercipta di daerah pantai. Hutan pantai akan menurunkan suhu penguapan air laut, dengan demikian hujan akan turun secara merata. Disamping itu keberadaan hutan pantai dapat menjaga keseimbangan alam, contohnya keseimbangan ikan dan nyamuk. Pantai yang rusak hutannya, dapat dipastikan daerah disekitarnya akan merupakan daerah rambahan nyamuk, karena ikannya (sebagai pemakan) tak ada dalam pantai yang rusak.

Selain itu keberadaan laut pun dipengaruhi air dari daerah hulu yang mengalir melalui sungai. Kualitas air yang mengalir tergantung kondisi bantaran sungai, yang selanjutnya berpengaruh pada kualitas air laut.

Bantaran sungai yang rusak akan menyebabkan air sungai keruh akibat longsor tanah. Bila longsor tanah ini langsung jatuh ke laut akan menyebabkan kehidupan laut berkurang, karena kekurangan cahaya matahari akibat keruhnya air laut.

Pantai Cidaun merupakan muara sungai Cidamar yang mengalirkan air dari hulu CAGS. Saat ini daerah aliran sungai (DAS) Cidamar telah dan sedang mengalami gangguan, diantaranya beralihnya fungsi DAS menjadi lahan garapan, *gawir* sudah tidak *awian* lagi, dan beberapa gangguan lainnya.

Melihat kondisi DAS Cidamar semakin parah harus dikembalikan lagi pada fungsinya. Kita tidak perlu mencari atau mengimpor konsep yang sulit tentang pemeliharaan hutan. Konsep pemeliharaan sudah berikan Allah SWT dalam QS 50 ayat 7-8 dan QS 50 ayat 9-11. Di tingkat lokal, *Karuhun* kita punya kearifan budaya yaitu: *Gunung kaian, Gawir awian, Sampalan kebonan, Dataran sawahan, Lebak caian, Legok balongan, Pasir talunan, Situ pulasaraeun, Lembur uruseun, Wahangan salametkeun, Basisir jagaeun, Cinyusu rumateun.*

Kelembagaan Masyarakat untuk Menyelamatkan DAS Cidamar.

Berdasarkan UU No 5 tahun 1990, Cagar Alam (CA) dikelola oleh Negara (BKSDA). Persepsi masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kecamatan tentang pengelolaan CA adalah bahwa segala sesuatu berkaitan dengan penjagaan, pemanfaatan CA dikelola secara terpusat oleh Negara. Implementasi sistem pengelolaan ini telah banyak mengalami penyimpangan, aturan menjadi kaku, pengawasan kurang. Disamping itu juga CA telah menjadi 'sumber mata pencaharian' sebagian masyarakat dan oknum petugas yang mengakibatkan hutan rusak. Sistem pengelolaan yang sentralistik pada kenyataannya sudah tidak bisa lagi menjaga kelestarian hutan

Pengelolaan yang baik semestinya dipegang oleh yang mengetahui banyak tentang CA, yaitu oleh masyarakat sekitar dan kelembagaan desa/kecamatan. Mereka merasakan langsung dampak keberadaan CA. Sebagaimana dalam Hadits Rosululloh SAW: "Jika suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya". Sudah saatnya pengelolaan hutan dikembalikan pada ahlinya, yaitu masyarakat dan pemerintahan desa setempat. Implementasinya, pengelolaan tidak dilakukan masyarakat secara sendiri-sendiri, tapi harus berbasis kelembagaan yang disahkan desa. Selain itu perlu dibangun peraturan tentang pelestarian dan pengelolaan CA untuk mengatur masyarakat dan kelembagaan desa.

Model penguatan kelembagaan desa seperti di atas telah dilakukan di lima Desa Kecamatan Cidaun di Simpang Timur. Model ini eksis setelah mengalami proses penguatan peranan masyarakat dan pemerintahan desa selama kurang lebih dua tahun. Untuk mengelola DAS Cidamar, model Perdes dan Raksabumi bisa didopsi dengan berbagai penyesuaian kondisi lokal dan pembenahannya.

Eksplorasi Masalah

Gambaran tentang kondisi fisik lingkungan beserta masyarakatnya di daerah hulu maupun hilir yang disajikan para presenter, menjadi bahan pemicu bagi masyarakat untuk mengungkapkan seluruh permasalahan yang dirasakan saat ini. Secara global masalah-masalah yang muncul adalah:

- Penebangan kayu di hutan dan bantaran sungai Cidamar akibat menjamurnya pengusaha *sirkel* (penggergajian kayu).
- Penggarapan lahan bantaran sungai oleh perorangan karena merasa SPPT yang dibayarnya tiap tahun merupakan bukti kepemilikan lahan.
- Belum adanya aturan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengelolaan lingkungan, khususnya DAS.
- Masih banyak masyarakat yang mata pencahariannya berkecenderungan merusak lingkungan.
- Gencarnya orang luar melakukan pendekatan dengan pemegang kebijakan untuk mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan Cidaun.

Kesepakatan Cidaun, Sebuah Langkah Awal

Dari permasalahan-permasalahan yang terungkap akhirnya terfokus pada pertanyaan-pertanyaan berikut :

- a. Apa permasalahan yang dihadapi DAS Cidamar?
- b. Apa dampaknya?
- c. Langkah apa yang harus ditempuh?
- d. Bagaimana keterkaitannya kawasan hulu dan hilir

Solusi pertanyaan-pertanyaan ini didiskusikan oleh empat kelompok diskusi. Hasilnya adalah masing-masing kelompok punya pandangan yang sama, yang disimpulkan dalam Kesepakatan Cidaun, sebagai berikut:

KESEPAKATAN CIDAUN		
Menyadari kenyataan rusaknya hutan di wilayah DAS Cidamar Kecamatan Cidaun akibat kurangnya kesadaran atas pentingnya hutan dan lemahnya penegakan hukum atas penyimpangan yang terjadi di lapangan, Masyarakat Cidaun menyatakan perlunya langkah-langkah sebagai berikut:		
1.	Segera dilakukan reboisasi di bantaran sungai dan lahan kritis melalui lembaga masyarakat dan pemerintah;	
2.	Pembenahan tata tertib lembaga masyarakat dan pembentukan peraturan desa tentang pelestarian lingkungan;	
3.	Masyarakat harus mentaati semua peraturan yang disepakati;	
4.	Adanya transparansi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat;	
5.	Pemberian informasi/pembinaan secara terpadu;	
6.	Menggalakkan program masyarakat untuk reboisasi dan mengembangkan teknologi tepat guna;	
7.	Segera dilakukan penyuluhan/sosialisasi tentang pentingnya hutan di wilayah DAS Kecamatan Cidaun;	
8.	Penertiban kepemilikan lahan di sepanjang DAS;	
9.	Penegakan hukum terhadap penebang liar;	
10.	Penyadaran kepada masyarakat harus intensif;	
11.	Harus adanya kerjasama antara masyarakat di hilir dengan di daerah hulu.	
Cidaun, 14 Desember 2004		

Peserta

Jumlah peserta yang hadir pada Loka Karya Cidaun ada 75 orang terdiri dari:

1. Perwakilan anggota satgas Raksabumi.
2. Para Kepala Desa di wilayah Kecamatan Cidaun
3. Para Ketua BPD di wilayah Kecamatan Cidaun
4. Perwakilan polhut BKSDA.
5. Perwakilan Polri Polsek Cidaun.
6. Perwakilan TNI Koramil Cidaun
7. Perwakilan Dinas Pertanian
8. Perwakilan Dinas Pengairan
9. Perwakilan Dinas PKT
10. Tokoh pemuda, wanita dan ulama masyarakat Cidaun

Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2004 di Desa Cimaragang Kecamatan Cidaun, Cianjur

Jam	Acara/Kegiatan	Nara Sumber/PJ
09.00	Pembukaan	Panitia
09.15	Sambutan Pemda Kab. Cianjur	Bpk Sekwilmat Cidaun
09.30	Sambutan PPKM	Bpk B. Sundayana
09.45	Sambutan DPKLTS *)	Bpk Asep R. Sudrajat
10.00	Rehat	
10.30	Presentasi masalah air dan lingkungan	Bpk DR Ir Mubyar Purwasasmita M.Sc. (Dewan Pakar DPKLTS)
11.15	Presentasi Program Raksabumi	YPAL, Perwakilan Masyarakat Simping
12.00	Istirahat, Shalat, Makan	
13.00	Diskusi dan penyusunan kesepakatan Cidaun	Panitia
14.00	Penutupan	Panitia

*) DPKLTS: Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda